THE ROLE OF BULOG-EAST JAVA REGIONAL DIVISION ANALYSIS FOR IMPLEMENTING THE ABSORPTION OF FARMERS AGRICULTURAL PRODUCT IN 2015

Muhamad Rifqi[1]

Abstract

This research analyzes the implementation of rice absorption policy of farmers in 2015 conducted by BULOG. Background of this research, there is an increase of rice production that happened in east java but can not improve farmer's prosperity. BULOG as an implementing agency of presidential policy for the purchase of farmers' rice crops, where this perpres determines the purchase price of the government to maintain the welfare of farmers. The purpose of this research is to analyze the implementation of policy of agricultural absorption of paddy farmer 2015 in East Java and To know the role that dilakuakan by BULOG East Java Regional Division in increasing the absorption of agricultural products. This research uses post positivist approach with qualitative method. The results of this study indicate that as a policy operator, BULOG has done an implementation that is still not good and can do improvement which will have a lot of influence on the welfare of farmers. In the absorption of yield from rice farming itself does not reach the target and proclaimed in BULOG purchased is seen dominated through partners BULOG which this much reduce the income of small farmers. The presence of BULOG is also not timely and much information about absorption by BULOG does not reach the farmers.

Keywords: Policy Implementation, Farmers Welfare, BULOG

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Bahkan terdapat peristilahan bahwa *makan bukan nasi adalah bukan makan.* Hal ini menjadikan penduduk Indonesia sebagai konsumen nasi yang tertinggi Nomor 4 di dunia. Indonesia dengan potensi yang dimilikinya belum mampu memenuhi kebutuhan makanan pokok penduduknya. Pada tahun 1984 Indonesia pernah mencapai taraf swasembada beras. Indonesia dengan potensi yang dimilikinya belum mampu memenuhi kebutuhan makanan pokok penduduknya. Pada tahun 1984 Indonesia pernah mencapai taraf swasembada beras. Data tingkat konsumsi beras dunia dapat dilihat pada table 1 dibawah ini.

[1] Penulis adalah Analis Penjaminan Mutu pada Universitas Bina Nusantara, dapat dihubungi melalui email: mrifqi@binus.edu

Tabel 1
Tingkat Konsumsi Beras Dunia

No	Negara	Konsumsi (Kapita/Tahun)
1	2	3
1	Indonesia	148,1 Kilogram
2	Myanmar (Burma)	227,5 Kilogram
3	Malaysia	90,7 Kilogram
4	Thailand	143,2 Kilogram
5	Jepang	60,8 Kilogram
6	Vietnam	214,2 Kilogram
Rata-rata Konsumsi Dunia		60,4 Kilogram

Sumber: www.uark.edu.edu (University of Arkansas), 2015

Ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan dapat mengancam kesejahteraan masyarakat Indonesia karena menimbulkan ketergantungan pada beras/padi impor. Tahun 2016 pemerintah mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand sebesar 900 ribu ton (detik.com, 2016)

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan luas panen komoditi pertanian di Indonesia padi mengalami peningkatan luas panen dari 13,2 juta hektar pada tahun 2011 menjadi 14,1 juta hektar pada tahun 2015. Sementara empat komoditi yaitu kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar dan ubi kayu mengalami penurunan. Produktivitas komoditi pertanian tujuh komoditi pertanian padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar dan ubi kayu mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini

Tabel 2
Luas Panen dan Produktivitas Komoditi Pertanian di Indonesia

Komoditi Pertanian	Tahun									
	2011		2012		2013		2014		2015	
	LP (juta ha)	PRO (kui/ha)	LP (juta ha)	PRO (kui/ha)	LP (juta ha)	PRO (kui/ha)	LP (juta ha)	PRO (kui/ha)	LP (juta ha)	PRO (kui/ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Padi	13,2	49,80	13,4	51,36	13,8	51,52	13,7	51,35	14,1	52,89
Jagung	3,8	45,65	3,9	48,99	3,8	48,44	3,8	49,54	3,8	51,39
Kacang Hijau	0,29	11,48	0,24	11,60	0,18	11,24	0,20	11,76	0,22	11,71
Kacang Tanah	0,53	12,81	0,55	12,74	0,51	13,52	0,49	12,79	0,46	13,26
Kedelai	0,62	13,68	0,56	14,85	0,55	14,16	0,61	15,51	0,62	15,73
Ubi jalar	0,17	123,29	0,17	139,29	0,16	147,47	0,15	152	0,13	159,37
Ubi Kayu	1,18	202,96	1,12	214,02	1,06	244,60	1,00	233,55	0,98	233,68

LP: Luas Panen
PRO: Produksi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Oktober 2015

Tabel diatas menunjukkan luas lahan panen sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini juga tampak pada produksi padi pada rentan waktu yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya peningkatan produksi beras oleh petani mestinya dapat meningkatkan pendapatan perkapita petani dari hasil produksi beras.

Data Sensus Pertanian Tahun 2013 jumlah petani Indonesia adalah 102,37 juta jiwa, dari data tersebut yang bekerja di sektor pertanian dan tanaman pangan adalah 52,10 juta jiwa atau 50,90 % dari total jumlah petani di Indonesia. Secara nasional dengan jumlah penduduk Indonesia 250 juta jiwa maka petani yang bekerja di sektor pertanian dan tanaman pangan adalah 20,8%.

Perum BULOG dari pertama kali berdiri hingga hari ini mempunyai tugas pokok menjaga kestabilan pangan di Indonesia. Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, Perum BULOG memiliki tugas publik yaitu :

1. Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG.
2. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program RASKIN.
3. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum BULOG dalam bentuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Ketiga tugas publik BULOG tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh, seperti visi Perum BULOG sebagai Perusahaan yang Unggul dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan.

Produktivitas tanaman pangan komoditi padi di Jawa Timur meningkat setiap tahunnya. Namun demikian justru kontribusi peningkatan produksi komoditi tersebut terhadap PDB justru semakin turun setiap tahunnya. Permasalahan lainnya adalah dengan meningkatnya luas panen dan produktivitas tanaman pangan komoditi padi ternyata belum mampu membuat petani sejahtera, karena data BPS per Maret 2015 menyebutkan 60% penduduk miskin Indonesia adalah petani, hal ini diperkuat dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian bersama Aliansi Petani Indonesia pada tahun 2014, dimana disebutkan bahwa pendapatan keluarga miskin dari hasil budidaya padi sawah irigasinya sejumlah Rp. 10.303.000 atau 20.6 persen dari total pendapatan keluarga. Sehingga kesimpulan kajian tersebut penghasilan dari pertanian tidak bisa memenuhi

kebutuhan keluarga dalam satu tahun. Untuk mencukupinya dibutuhkan sumber pendapatan dari non pertanian.

Kesenjangan yang terjadi antara luas panen dan produktivitas tanaman pangan komoditi padi yang selalu meningkat, dengan kontribusi tanaman pangan komoditi padi dalam PDB yang selalu menurun, ditambah dengan data BPS yang menyebutkan 60% penduduk miskin Indonesia adalah petani merupakan indikasi bahwa Perum BULOG belum memiliki peran yang signifikan dalam mensejahterakan petani di Indonesia dan kontribusinya dalam PDB Indonesia. Untuk melihat kesenjangan lebih dekat, maka kita bisa melihat kondisi Jawa Timur dimana pada tahun 2003 Jawa Timur mengambil alih sebutan "lumbung padi nasional" dari Propinsi Jawa Barat. Dari tahun 2003 Hingga tahun 2015 jumlah luas panen dan produksi padi di Propinsi Jawa Timur selalu meningkat, bila pada tahun 2003 jumlah luas panen 1.695.514 hektar dengan produksi 8.914.995 ton, maka pada tahun 2015 luas panen padi 2.136.872 hektar dengan produksi 13.054.511 ton. Berikut kami sajikan Jumlah Luas Panen dan Produksi Padi Jawa Timur lima tahun terakhir.

Tabel 3
Jumlah Luas Panen dan Produksi Padi Jawa Timur

Tahun	Luas Panen Padi		Produksi Padi	
	Luas Panen (Ha)	Presentasi Nasional (%)	Produksi Padi (Ton)	Rata – Rata Produksi Nasional
1	2	3	4	5
2011	1 926 796	14,59	54.89	49.80
2012	1 975 719	14,69	61.74	51.36
2013	2 037 021	14,72	59.15	51.52
2014	2 072 630	15,02	59.81	51.35
2015	2 136 872	15,07	61.09	52.89

Sumber : Badan Pusat Statistik, Desember 2015

Data Badan Pusat Statistik pada Bulan Maret 2015, menyebutkan bahwa Jawa Timur merupakan propinsi dengan penyumbang orang miskin terbesar di Indonesia dengan 4,78 juta jiwa. Bila kita melihat data Tahun 2011 hingga 2015 jumlah orang miskin di Propinsi Jawa Timur mengalami penurunan dari 5.251.400 jiwa pada Tahun 2011 menjadi 4.789.120 juta jiwa pada tahun 2015. Namun bila dibandingkan dengan angka pada tahun 2014, orang miskin di Jawa Timur mengalami peningkatan, yang harus diperhatikan adalah jumlah orang miskin di Propinsi Jawa Timur selalu diatas rata-rata nasional.Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 4
Kondisi Kemiskinan Propinsi Jawa Timur

Keterangan	2011	2012	2013	2014	Maret 2015
Presentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk					
Jawa Timur	13,85	13,08	12,73	12,28	12,34
Nasional	12,36	11,66	11,46	10,96	11,22
Presentase Penduduk diatas garis Kemiskinan					
Jawa Timur	86,15	86,92	87,27	87,72	87,66
Nasional	87,51	88,34	88,53	89,04	88,78
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)					
Jawa Timur	5251,45	4992,75	4893,01	4748,42	4789,12
Nasional	30018,93	28594,60	28553,93	27727,78	28592,83

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas Maret 2015

Dari data Badan Pusat Statistik pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 3.216.000 jiwa. Sementara itu 67,15% penduduk miskin adalah petani yang tinggal di pedesaan, sehingga bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Timur 67,15% merupakan petani. Dari data tersebut terlihat sangat jelas gap yang terjadi antara meningkatnya produktivitas petani tidak sejalan dengan jumlah kemiskinan penduduk, dimana 67,15% penduduk miskin merupakan petani. Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Peranan Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timur Mengimplementasikan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Propinsi Jawa Timur?
2. Faktor eksternal dan internal apa yang menghambat atau membantu Peranan Perum BULOG dalam tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Propinsi Jawa Timur?

Dari permasalahan dan pertanyaan penelitian, maka yang menjadi tujuan penelitian antara lain adalah Untuk menganalisis peranan Perum BULOG dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Jawa Timur dan Untuk mengetahui bagaimana peranan Perum BULOG dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Propinsi Jawa Timur.

TEORI

Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan Publik merupakan salah satu mata rantai dari proses kebijakan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik (*Public Policy Process*). Menurut James E Anderson (2011: hal. 7) definisi kebijakan publik adalah '*Public policies are developed by government bodies and official*'.Lebih jauh, Anderson (2011: 4) mengatakan bahwa proses kebijakan (*policy process*) meliputi tahap *Policy Agenda*, *Policy Formulation*, *Policy Adoption*, *Policy Implementation* dan *Policy Evaluation*. Thomas R Dye, (2002) mengatakan kebijakan publik adalah

Whatever government choose to do or not to do. Sedangkan David Easton mengatakan bahwa kebijakan publik diformulasikan oleh para 'otoritas' dalam suatu 'sistem politik' (Anderson, 2011: 7). Definisi diatas mengandung makna bahwa suatu proses kebijakan, yang berlangsung suatu proses kebijakan.Pembuat kebijakan adalah badan-badan dari pejabat pemerintah yang merupakan suatu OTORITA (*authority*) pembuat kebijakan.

Model implementasi kebijakan publik sudah banyak dijelaskan oleh para pakar.Salah satunya adalah Model implementasi kebijakan menurut Grindle.Dia menejlaskan bahwa kesuksesan dalam implementasi kebijakan membutuhkan dukungan dan komitmen politik dari para stakeholders (politisi, birokrasi, sasaran langsung kebijakan, dan masyarakat luas) untuk melaksanakan kebijakan yang sudah diputuskan merupakan modal dasar bagi keberhasilan suatu kebijakan. Selain itu ada faktor faktor yang merupakan syarat utama bagi keterlaksanaan suatu kebijakan publik diantara nya adalah faktor kecukupan finansial, sistem manajerial yang efektif dan efisien, serta kemampuan teknis pelaksana. Grindle mengatakan bahwa para pengambil kebijakan dan pelaksana lapangan tentang kemungkinan terjadinya gap (kesenjangan) antara tujuan kebijakan yang diambil dan hasil yang dicapai di lapangan. Model implementasi yang diperkenalkan oleh Grindle adalah model implementasi kebijakan yang melihatnya sebagai proses politik dan administrasi. Model ini menjelaskan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif.Proses politik terlihat melalui proses pengambilan keputusan sebuah kebijakan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi dapat terlihat melalui proses umum mengenai aksi administrative.(Grindle, 1980) Untuk lebih mengetahui posisi antara domain politik dan administrasi dalam teori Grindle dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi

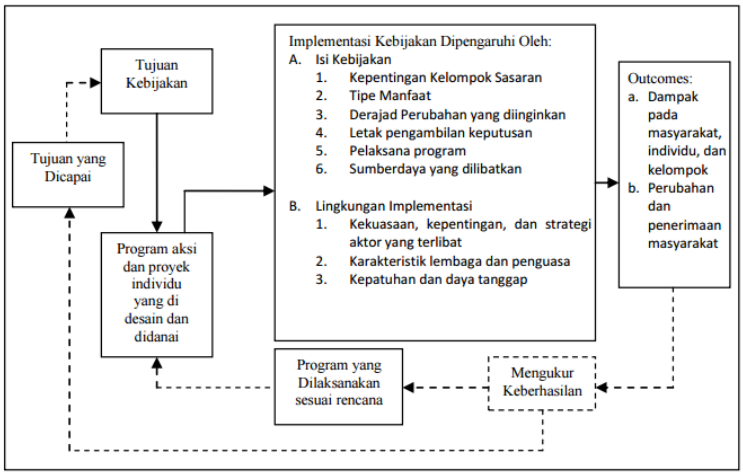

Sumber: Grindle, 1980:11.

Implentasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur keluaran (output) program berdasarkan tujuan kebijakan. Keluaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Keluaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran Selanjutnya, keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) seperti terlihat pada bagan tersebut.

Konsep BUMN

BUMN telah menjadi alat bagi beberapa negara untuk memposisikan diri mereka lebih baik dalam masa depan ekonomi global, mengingat meningkatnya persaingan global dalam bidang keuangan, bakat, dan sumber daya. Meskipun ada banyak BUMN yangtumbuh kian pesat, secara umum terdapat tren penurunan dalam hal kepemilikan negara, bahkan ketika mempertimbangkan efek dari krisis finansial. Meskipun ada banyak dorongan dan motivasi yang berbeda, di mana kepemilikan negara paling banyak dipilih, BUMN tidak seharusnya hanya semata-mata dievaluasi atas dasar hasil keuangan saja (laba rugi), tetapi lebih kepada bagaimana mereka berkontribusi dalam penciptaan nilai sosial dalam masyarakat, dilihat dari dampak yang mereka berikan.

BUMN perlu pola penilaian baru, yang mampu menangkap *Key Performance Indicators* (KPI) yang dapat menghubungkan pada tujuan yang lebih luas.Hal ini tentunya melampaui hasil finansial untuk mempertimbangkan keseluruhan dampak dalam modal sosial lainnya seperti hubungan sosial, manusia, inovasi, warga dan kesejahteraan, dan modal lingkungan. Untuk mencapai tujuan penciptaan nilai publik dan pertumbuhan yang baik, BUMN di masa depan haruslah mengembangkan beberapa cara berikut: (a) Secara aktif dimiliki dan dikelola dengan cara membangun tujuan dan misi yang jelas untuk BUMN, terkait dengan tujuan dan hasil pada masyarakat yang diinginkan.

BUMN berfungsi sebagai katalis untuk mewujudkan nilai-nilai yang disepakati secara bersama dan berkelanjutan. BUMN dikenal dengan banyak nama, diantaranya: perusahaan pemerintah perusahaan bisnis pemerintah, perusahaan yang terkait dengan pemerintah, perusahaan publik, unit sektor publik dan sebutan lainnya.

Definisi BUMN juga sering bervariasi antar negara. Penelitian[2] menyebutkan bahwa ada berbagai bentuk hukum untuk BUMN, tergantung pada faktor-faktor

[2] OECD, 2005, "OECD Comparative Report on Corporate Governance of State-owned Enterprises"

sebagai berikut: (a) Tingkat pemerintahan yang menjadi pemilik BUMN tersebut (pusat/federal, negara bagian/regional, atau pemerintah daerah). (b) Cara perusahaan didirikan. (c) Posisi dalam struktur hirarki administrasi publik. (d) Tujuan didirikannya BUMN. (e) Status BUMN jika sedang dalam proses dijadikan perusahaan swasta/privatisasi.

Definisi BUMN di setiap negara tidak lepas dari karakteristik pemerintahan yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh OECD menyebutkan bahwa bentuk BUMN dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut[3]: (a) Menyangkut kepemilikan dapat bersifat kepemilikan penuh, mayoritas atau minoritas oleh pemerintah. (b) Terdaftar atau tidak terdaftar pada Bursa Saham. (c) Kepemilikan saham pemerintah melalui alat-alat seperti Dana Pensiun Pemerintah, Dana Pengelolaan Asset, Restrukturisasi perusahaan dan pemberian pinjaman pembangunan. (d) Kemungkinan yang bertentangan dengan kepemilikkan negara, misalnya perusahaan yang telah mendapat hak eksklusif oleh negara.

Kendati adanya berbagai bentuk BUMN yang memungkinkan fleksibilitas bagi pemerintah, namun pemerintah sering menghadapi berbagai persoalan dalam mengatur kebijakan kepemilikan BUMN.Hal in menyebabkan rendahnya transparansi serta membatasi BUMN dari kerangka hukum yang biasa berlaku pada perusahaan lainnya, termasuk persaingan undang-undang, ketentuan gulung tikar ataupun undang-undang sekuritas.

1. Menyediakan barang kebutuhan publik (misalnya pertahanan nasional dan taman umum) dan barang layak (misalnya kesehatan publik dan pendidikan), yang keduanya memberi manfaat bagi anggota masyarakat dan di dalam mana masyarakat cenderung memilih pembayaran secara kolektif dengan pajak.
2. Meningkatkan hubungan kerja, khususnya di sektor strategis.
3. Membatasi kontrol pribadi dan asing dalam pekonomian domestik.
4. Menghasilkan dana publik. Yakni negara berinvestasi di sektor tertentu dan mengontrol pemasukkan tertentu untuk memonopoli harga dan kemudian menggunakan pendapatan BUMN yang dihasilkan sebagai penghasilan.

The World Bank, 2006, ”Held by the Visible Hand – the Challenge of SOE Corporate Governance for Emerging Markets”
Kowalski, P. et al (2013), ”State-Owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications”, OECD Trade Policy Papers, No.
147, OECD Publishing.
[3]OECD, 2005, “OECD Comparative Report on Corporate Governance of State-owned Enterprises”
The World Bank, 2006, ”Held by the Visible Hand – the Challenge of SOE Corporate Governance for Emerging Markets”
Kowalski, P. et al (2013), ”State-Owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications”, OECD Trade Policy Papers, No.
147, OECD Publishing.

5. Meningkatkan akses terhadap layanan publik. Negara dapat membuat BUMN menjual barang dan jasa tertentu dengan harga murah yang ditargetkan pada kelompok tertentu sebagai sarana untuk membuat layanan tertentu lebih terjangkau demi kebaikan masyarakat melalui subsidi silang.
6. Mendorong pengembangan ekonomi dan industrialisasi dengan cara: (i) Menopang sektor yang diminati dalam perekonomian dan khususnya untuk memepertahankan lapangan pekerjaan. (ii) Meluncurkan industri baru dan yang sedang berkembang dengan menyalurkan modal ke BUMN yang bisa menjadi cukup besar untuk mencapai skala ekonomi di sektor-sektor dimana sebaliknya biaya modal awal cenderung signifikan. Hal ini bisa dilihat sebagai alternatif regulasi khususnya dimana ada monopoli dan oligopoli alamiah (misalnya seperti listrik, gas dan kereta api); (iii). Mengontrol kemunduran *sunset industri* (atau industri yang telah melewati masa kejayaannya), dengan penerimaan saham kepemilikan negara sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan.

Dengan kata lain, tujuan pemerintah BUMN secara umum, adalah untuk menciptakan kekayaan ekonomi dan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan bagi warganya. Sebaliknya, pemegang saham perusahaan swasta memiliki fokus utama untuk mencari keuntungan finansial yang mampu dihasilkan perusahaan, yang mengarah kepada pembagian dividen.

BUMN terkadang juga dianggap perlu lebih terbuka secara umum kepada masyarakat karena besarnya kontribusi masyarakat yang lebih luas, sehingga ada tuntutan transparasi dan akuntabilitas yang lebih besar kepada BUMN.Bahkan pada kenyataannya BUMN mengaku ada kebutuhan yang meningkat dalam hal penyingkapan dan peningkatan transparasi serta akuntabilitas antar BUMN, [4] tentang bagaimana caranya hal ini muncul dalam praktik berbeda di beberapa negara.

Meskipun dalam banyak hal BUMN menghadapi peluang dan ancaman yang sama seperti halnya bisnis sektor swasta, terdapat juga perbedaan penting yang memiliki pengaruh besar dalam menciptakan nilai secara keseluruhan bagi masyarakat. BUMN harus berjalan perlahan ketika menyeimbangkan antara tujuan ekonomi, social dan tujuan lainnya.

BUMN juga dapat memainkan peranan besar dalam peningkatan kualitas mutu.Misalnya saja dalam meingkatkan standard barang dan jasa pelayanan yang disediakan perusahaan kecil dan menengah, misalnya UKM, yang mungkin saja terdiri dari rantai pasokan mereka.

Kesejahteraan Rakyat

Pelayanan Publik yang diberikan oleh BULOG diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan petani yang menjadi tulang punggung akan ketahanan pangan di Indonesia. Berbicara mengenai kesejahteraan sosial itu sendiri.Di bawah ini ada beberapadefinisi kesejahteraan sosial.Arthur Dunham (1978) mendefinisikan:

[4] OECD, 2011, “State-owned Enterprise Governance Reform – An Inventory of Recent Change”

”Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkankesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untukmemenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupankeluarga dan anak, kesehatan,penyesuaian sosial, waktu senggang, standarstandarkehidupan, dan hubungan-hubungan sosial”. (Sukoco, 1991, hal. 6).Lebih jauh, kesejahteraan sosial dapat dipahami sebagai keseluruhan usaha sosial yang terorganisir danmempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatberdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup kebijakan danpelayanan yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat mencakup pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi dantradisi budaya sebagaimana dicantumkan dalam rujukan *Pre-conference working committee for the XVth international conference of social welfare.*

Friedlander (1980) mengemukakan definisi kesejahteraan sosial sebagai berikut:

> *Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community. (Sukoco, 1991, hal. 6)*

Friedlander mengartikan “kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang terorganisir untuk membantu individu-individu dan kelompok tertentu agar dapat mencapaistandar kehidupan dan kesehatan yang layak, serta pengembangan hubungan pribadi dan sosial mereka agar dapat meraih keselarasan dengankebutuhankeluarga maupun komunitas mereka.

Dengan definisi definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa konsep kesejahteraan sebagai suatu system yang ada pada lembaga-lembaga dan pelayanan sosial.Tujuan sistem tersebut adalah untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti tingkat kebutuhan pokok danjuga relasi-relasi sosial dengan lingkungannya. Kesejahteraan tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan kemampuan individu baik dalam memecahkan masalah maupun dalam memenuhi kebutuhannya, jadi pengertian dari kesejahteraan sosial adalah suatu aktifitas yang terorganisasi yang ditujukan untuk membantu tercapainya suatu penyesuaian timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah *post-positivisme*.Pendekatan *post-positivisme* digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian ini.Salah satu aspek yang menjadi ciri paradigma *Post-Positivisme* adalah menggunakan teori sebagai acuan.Penelitian ini dikonstruksikan sedemikian rupa terhubung secara empiris dengan definisi

operasional yang digunakan.*Post-Positivisme* tercermin melalui hubungan interaktif antara peneliti dengan obyek yang diteliti.Paradigma penelitian ini berusaha menangkap subyek kebenaran melalui keterlibatan aktif antara peneliti dengan obyek yang diteliti.Meskipun demikian, peneliti tetap menjaga jarak atau bersikap netral bilamana terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma.Dalam mendapatkan data data yang akurat peneliti melakukan studi pustaka dan wawancara untuk mentriangulasikan data data tersebut ke narasumber yang berkaitan dengan implementasi kebijakan ini.Objek penelitian ini adalah peran BULOG divisi regional Jawa Timur dalam menyerap hasil padi di wilayah kerjanya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Peran BULOG Divisi regional Jawa Timur dalam implementasi Kebijakan penyerapan hasil pertanian yang mana dituangkan dalam Instruksi presiden No 5 tahun 2015 masih belum dapat dikatakan baik, karena dalam penyerapan tersebut dalam lima tahun (2012 – 2016) tidak pernah BULOG dapat mencapai targetnya. Terlebih pada tahun 2015 hanya sekitar 70% dari target yang dapat dilakukan oleh BULOG.

Grafik 1. Realisasi dan Target Penyerapan Hasil Petani oleh Bulog

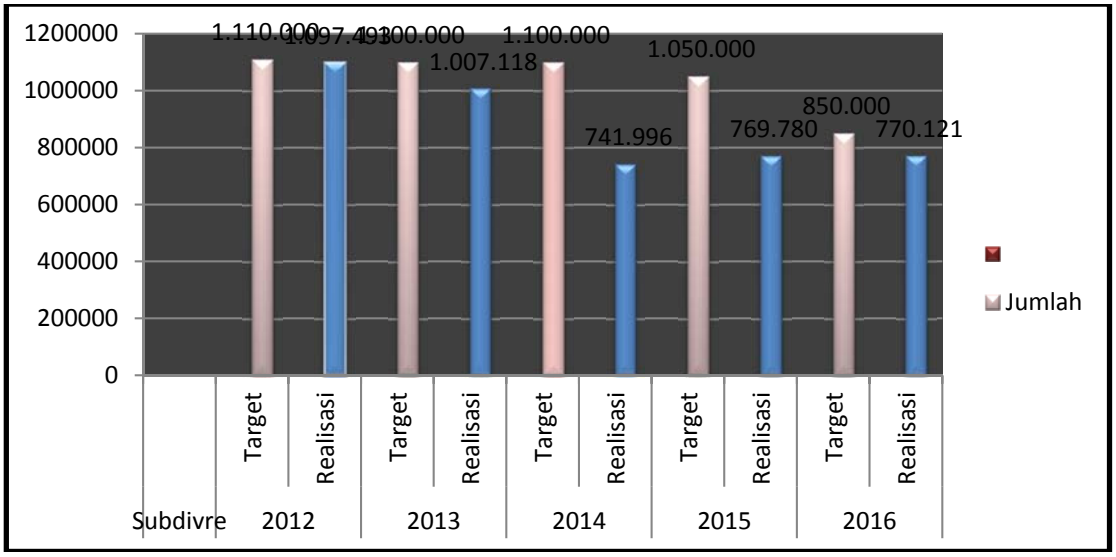

Padahal produksi dalam Jawa Timur Sendiri sangatlah besar yaitu sampai 6 juta ton dalam beras atau 12 juta ton padi.Ini menjadikan peran tengkulak lebih dominan dibandingkan oleh BULOG.Menurut Grindle Sebuah kebijakan dipengaruhi oleh Konten dan Konteks yang mana akan terlihat dalam hasil dari sebuah implementasi tersebut. Peneliti menemukan bahwa dalam penyerapan yang dilakukan oleh BULOG Jawa Timur diketahui bahwa cara yang dilakukan oleh BULOG dalam menyerap hasil pertanian adalah dengan mengandalkan Mitra yang mana disini

sebagai perantara antara BULOG dan Petani dimana ini akan menimbulkan kurangnya harga yang diterima oleh petani karena pasti mitra Bulog ini akan mengambil keuntungan dari proses yang ada. Bisa di lihat dibawah ini adalah jalur jalur penyerapan.

Tabel 5. Jalur Penyerapan Bulog

SUBDIVRE							
	Penggilingan	Gapoktan	KUD	KTNA	MKP	Satker	Jumlah Saluran
Surabaya Utara	15				15	2	32
Surabaya Selata	21		1		22	1	45
Bojonegoro	32	1	2		35	4	74
Madiun	16	1	1		18	1	37
Kediri	10				10	3	23
Bondowoso	18	1	1		20	3	43
Malang	9		1		10	2	22
Probolinggo	11				11	2	24
Banyuwangi	24	3		1	28	2	58
Tulungagung	13	1			14	2	30
Jember	11		1		12	2	26
Madura	8				8	1	17
Ponorogo	15		1		16	2	34
Divre Jatim	203	7	8		219	27	465

Sumber: BULOG Divre Jawa Timur

Dengan Komposisi tersebut tidak heran jika hamper 90% penyerapan yang dilakuakn oleh BULOG Jawa Timur melalui Mitranya. Namun memang tidaklah mudah untuk BULOG untuk dapat menyerap sendiri hasil dari petani dikarenakan memang dalam prosesnya banyak petani yang sudah ketergantungan dengan pihak mitra dimana banyak petani yang ketika ingin produksi mereka meminjam modal dari Mitra dan juga dalam pencairan uang hasil produksi mereka banyak yang langsung dibayar jadi tidak menunggu beberapa hari lagi untuk dapat menikmati hasil pertanian tersebut. Ini mengakibatkan kesejakteraan petani yang kurang baik dimana dalam wawancara kami dengan petani ada yang dihargai hasil pertanian nya hanya Rp 3200 per kilonya padahal harga pemerintah adalah 3700 dalam bentuk gabah dimana banyak selisih yang berkurang. Hal ini disebabkan juga dari seringnya keterlambatan BULOG dalam saat panen raya keharian BULOG tidak ada maka para tengkulak itu dengan luluasa melakukan penakan harga yang tidak bisa ditolak oleh petani dekarenakan daripada hasilnya hanya membusuk tidak ada pemasukan maka di jual dengan harga murah ini juga disebabkan kebanyakan petani tidak meliliki lantai jemur untuk mengolah hasil pertanian ini jadi mereka memang sangat ketergantungan oleh penggilingan yang sering menjadi pedangan yang bermentalkan Tengkulak.

Peran yang dapat dilakukan oleh BULOG seharusnya mereka dapat membeli langsung dari petani kecil dalam bentuk apapun itu karena BULOG memiliki banyak

sarana yang dapat di manfaatkan oleh mereka dalam mengolah hasil petani yang masih perlu diolah tersebut.BULOG seharusnya menambah kapasitas dari gudang mereka dimana saat ini hanya mampu menampung 1 juta ton padi. Dilihat dari hasil produksi yang mampu di hasilkan wilayah Jawa timur yaitu sekitar 6 juta ton padi maka setidaknya BULOG mampu menampung setengah dari hasil pertanian tersebut sehingga peran BULOG Jawa Timur dapat meningkat dan membuat harga lebih banyak yang tercover dari HPP yang telah ditetapkan sehingga kesejahteraan petani dapat lebih terjamin. Hal ini dilakukan sehingga dapat Indonesia berdaulat pangan karena seperempat hasil beras di Indonesia di produksi oleh Jawa Timur.

Konten kebijakan

Konten kebijakan inpres no 5 tahun 2015 dalah tentang harga dimana pemerintah menjaga harga padi agar stabil baik di tingkat produsen dan konsumen.Ini tidak dapat dipisahkan dari peran Petani dimana pasti petani haruslah dijaga kesejahteraannya agar mau tetap menjadi petani. Saat ini Jumlah petani di Jawa Timur adalah 3,6 juta jiwa dimana ini telah mengalami penurunan terus sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan dinas pertanian Jawa Timur Pak Min. manfaat dari kebijakan ini masih kurang dapat dirasakan oleh petani karena dalam penyerapan yang dilakukan oleh BULOG, Banyak melalui Mitranya yang juga pasti mengambil untung dari petani. Hal ini disanyangkan karena program kerja BULOG yaitu penyerapan hasil pertanian ini menjadi tidak dapat dirasakan oleh petani dengan baik.Padahal keadaan sumber sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup baik namun karena terlalu mengandalkan pihak ketiga maka menjadi kurang terpakai.Demikian dengan anggaran yang dimiliki oleh BULOG menjadi tidak tepat ke petani namun lebih banyak ke mitranya.

Konteks kebijakan

Aktor Aktor yang terlibat dalam kebijakan ini setidaknya melibatkan beberapa Instansi pemerintah dan Swasta sehingga banyak kepentingan yang beradu dan hasilnya adalah kurangnya kesejahteraan petani, padahal petani merupakan actor Utama akan keberhasilan dari kebijakan ini. Bisa dilihat dari cuplikan wawancara dibawah ini dimana harapan petani di jawa Timur ke BULOG *"Ya sebenarnya harapannya ada. Supaya dolok itu menerima dari petani langsung.Jadi petani itu nggak begitu rugi. Kan dari harga dolok sama pengepul nanti kan sudah urunan berapa kali itu. ya toh?"*selain itu ada juga harapan yang di utarakan dari Dinas Pertanian Jawa Timur "*Jadi yang pertama, uang Bulog itu menyesuaikan dengan saat panen. Yang kedua, apa pun bentuknya, baik gabah mau pun beras, itu Bulog punya peralatan, punya gudang, punya sarana semuanya, untuk menyerap dalam bentuk apa pun di petani. Jadi kalau petani jual gabah yang kering panen, ya di Bulog itu sudah ada pengeringnya, ada lantai jemurnya.Misalnya petani manjual dalam bentuk gabah kering giling, Bulog punya gudangnya, Bulog punya slepnya untuk mengubah*

*dari gabah ke beras.Itu lah.Jadi Bulog bisa menampung dalam betuk apa pun produksi petani."*Ketika peneliti mencoba mengklarifikasi dengan keadaan yang ada di lapangan memang benar BULOG sering tidak tepat waktu dalam penyerapan nya karena itu banyak petani yang akhrinya menjual kepada Tengkulak atau ke Mitra BULOG.

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya dihasilkan beberapa kesimpulan. *Pertama*, Peran dari BULOG dalam Implementasi Kebijakan Inpres No 5 tahun 2015 ini masih dabanyak harus dilakuakan peningkatan dimana akan menghasilkan kesejahteraan petani yang meningkat dimana kehairan yang tepat waktu dan juga jalur penyerapan yang tidak mengandalkan mitra menjadi kunci Utama agar BULOG dapat lebih berperan dalam implementasi kebijakan ini. *Kedua*, Dalam peningkatan hasil penyerapan petani BULOG masih belum dapat memaksimalkan sumber prasarana yang dimilikinya dimana ini sangat amat disayangkan karena jika BULOG dapat memaksimalkan apa yang dimilikinya maka Petani dapat menjual langsung ke BULOG dimana akan di olah oleh BULOG yang hasilnya akan berdapak pada kesejahteraan petani yang meningkat karena dapat langsung harga dari BULOG dimana pasti akan lebih baik di bandingkan dari pihak ketiga.

Berangkat dari temuan dan kesimpulan, maka rekomendasi yang diberikan adalah Pembelian hasil pertanian oleh BULOG sangatlah memberi manfaat pada Petani namun disayangkan dikarenaka ketidak langsungan pembelian yang dilakukan oleh BULOG ini mengakibatkan berkuranya kesejahteraan petani dan juga kehadiran yang tidak tepat waktu menjadi kesempatan para tengkulak dalam menekan harga petani. Maka dari itu akan lebih baik BULOG dapat meningkatkan satuan kerja mereka yang mampu membeli hasil pertanian langsung dari petani. Serta melihat banyak produksi yang hasilkan Jawa Timur maka setidaknya BULOG meningkatkan kapasitas gudang mereka sehingga lebih banyak menyerap hasil yang ada di lapangan dengan demikian peranan BULOG Jawa Timur semakin dirasakan oleh petani.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, James E. 1997. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston

Arifin, A. 2003. *Hutan Mangrove, Fungsi dan Manfaatnya*. Yogyakarta: Kanisius

Badan Urusan Logistik. 1971. *Seperempat Abad Bergulat dengan Butir-butir Beras*. Indonesia: Badan Urusan Logistik

Baja, S. 2012. *Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah*. Jakarta:Andi

Cicin Sain, B. and Knecht, R.W. (1998), *Integrated Coastal and Ocean Management: Concepts and Practices*. Island Press, Washington D.C

Clark C and D Cobett. 1999. *Reforming The Public Sector, Problem and Solution*. St.Leonards, Australia: Allen & Unwin

Dahuri, R. dan Rais, J. (2004). *Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita

Dale, P. F., McLaughlin, J. D. (1999). *Land Administration*. Oxford University Press, 1999

Dewi, R. K. (2016). *Studi Analisis Kebijakan.* Bandung: Pustaka Setia

Dunn, William N. 1994. *Public Policy Analysis*. Englewood Cliffs.

Dwiyanto, A. (2015). *Administrasi Publik.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Dye, Thomas R. 2005. *Understanding Public Policy,* 11th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.

_____ (1992). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs

Easton, David. *The Political System: An Inquiry into The State of Political Science*. 1953: Alfred A. Knopf, N.Y; 2nd ed. 1971, 1981

_____ "*An Approach to The Analysis of Political Systems*", 1957: World Politics, Vol. IX, pp. 393-400.

_____ "Seperempat Abad Bergulat dengan butir butir beras" 1970: Badan Urusan Logistik

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press

Fauzi, A. dan Anna, S. (2005). *Permodelan Sumber Daya Perikanan*. Jakarta: Gramedia

Feder, G. and Feeny, D (1991), *Land Tenure and Property Rights: Theory and Implications for Development Policy*. The World Bank Economic: Oxford University Press

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press

Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hoogerwerf. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. New York: Penerbit Erlangga.

Howlett M and M Ramesh. 2004. *Study Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. New York: Oxford University Press.

Islami, Irfan. (1986, 2004). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

Jones, Charles O. 1984. *An Introduction to The Study of Public Policy*. Belmont: Wardworth Publishing.

Kingdon, J. W. (1995). *Agendas, Alternatives and Public Policies.* New York: HarperCollins College Publishers.

Kodoatie, R. J. dan Syarief, R. (2010). *Tata Ruang Air*. Jakarta

Kowalski, P. et al (2013), "State-Owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications", OECD Trade Policy Papers, No.

Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gava Media.

Leksono, S. P., Hamidi, J., Alamsyah, A., & M. Zen, A. P. (2006). *Pelayanan Publik bukan Untuk Publik.* Jakarta: YAPPIKA.

Lester, James P and Joseph Stewart. 1996. *Public Policy, An Evolutionary Approach*. New York: West Publishing Company.

Mazmanian, D. H, dan Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins

Michael, EL. 2006. *Public Policy, The Competitive Framework*. Oxford. London.

Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya

Mulyadi, Deddy; Gedeona, Hendrikus T.; Afandi, Muhammad Nur;. (2016). *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik.* Bandung: ALFABETA.

Nawawi, I. (2009). *Public Policy.* Surabaya: PMN.

Neshyba, S. (1986). *Oceanography Perspective on a Fluid Earth*. Corvallis, Oregon State University

Nugroho, D. R. (2011). *Public Policy*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo

Numberi, F. (2009). *Perubahan Iklim, Implikasinya terhadap Kehidupan di Laut, Pesisir,dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: Fortuna

OECD, 2005, "OECD Comparative Report on Corporate Governance of State-owned Enterprises"

OECD, 2011, "State-owned Enterprise Governance Reform – An Inventory of Recent Change"

Pressman, Jeffrey L. And Aaron Wildavsky. 1979. *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland*. 2nd edition. LA: University of California Press.

Purwanto, Erwan Agus; Sulistyastuti, Dyah Ratih;. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gava Media.

Satria, A. (2009). *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKIS

Silalahi, Ulber; Syafri, Wirman;. (2015). *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik.* Jatinangor Bandung: IPDN PRESS.

Suharto, E. (2008). *Analisis Kebijakan Publik* (Revisi ed.). Bandung, ALFABETA.

Sukandarrumidi. (2010). *Bencana Alam dan Bencana Anthropogene*. Yogyakarta: Kanisius

Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

The World Bank, 2006, "Held by the Visible Hand – the Challenge of SOE Corporate Governance for Emerging Markets"

Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2007

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang 19/Prp/Tahun 1960 tentang 'Perusahaan Negara'
Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang 'Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera'
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 'Pangan'
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 'Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat'
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 'Badan Usaha Milik Negara'
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 'Pemerintah Daerah'
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 'Pelayanan Publik'
Presidium Kabinet Nomor 114/U/Kep/5/Tahun 1967 tentang 'Pembentukan Badan Urusan Logistik'
Presidium Kabinet Ampera Nomor 87 Tahun 1966 tentang 'Pembentukan Kolognas'
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1969 tentang 'Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Urusan Logistik'
Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1978 tentang 'Badan Urusan Logistik'
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1993 tentang 'Badan Urusan Logistik'
Keputusan Presiden Nomor 61/M/Tahun 1995 tentang 'Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Dipisahkan dengan Bulog'
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang 'Badan Urusan Logistik'
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1997 tentang 'Perubahan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik'
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1998 tentang 'Perubahan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik'
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang 'Perpustakaan Nasional Republik Indonesia'
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2000 tentang 'Badan Urusan Logistik'
Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2000 tentang 'Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan'
Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang 'Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen'
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 'Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang 'Perubahan Keputusan Presidenatas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND'
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang 'Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001'
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang 'Pendirian Perum BULOG'
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1996 tentang 'Pangan'

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang 'Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)'

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang 'Ketahanan Pangan'

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang 'Kebijakan Perberasan'

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang 'Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras yang Dikelola Oleh Pemerintah dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim'

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahum 2012 tentang 'Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah'

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang 'Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas Gabah/Beras'

Artikel & Jurnal

Drury, Bruce. 1999. *American Political Science Association Style Manual*. http://dept.lamar.adu/polisci/DRURY/drury.html

Hakam. A., Istijono. B, Ismail. F.A., Zaidir, Fauzan, Dairino, Revalin. (2013). *Penanganan Abrasi Pantai di Indonesia*. Mataram: Prosiding Seminar Nasional Riset Kebencanaan

McIntyre, Janet. 2001. Critical Systemic Praxis for Social and Environtmental Justice: A Case Study of Management, Governance and Policy. *Systemic Practice and Action Research* Vol 15 No 1 February 2002.

Political Science 2302 http://www.accd.edu/sac/gov/smith/2302/Lecture01.htmAccessed 21 May 2007.

Ross, Don. "Game Theory". *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2005 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =http://plato.stanford.edu/archives/win2005/entries/game-theory/

Shaw, Jane. 2002. *The Public Choice Theory*. The Concise Encyclopedia of Economics. http://www.econlib.org/library/Enc/PublicChoiceTheory.html

www. http://jatimprov.go.id/